

# PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ORGANISASI MASYUMI MENANGGAPI PERJANJIAN ROEM-ROYEN TAHUN 1949

**Tommy Juliantara**

STID Al-Hadid, Surabaya

[tommyjuliantara@gmail.com](mailto:tommyjuliantara@gmail.com)

**Abstrak:** Konflik dalam suatu organisasi selalu ada dan tidak dapat dihindari. Konflik bisa mengarah pada perilaku menyimpang dari aturan, prosedur kerja, dan mengganggu pencapaian sasaran organisasi bila diabaikan begitu saja. Sehingga, perlu adanya pengelolaan atau penyelesaian secara baik, agar organisasi tetap produktif mencapai sasaran-sasarannya meskipun dilanda konflik. Salah satu penyelesaian konflik yang dapat dijadikan pelajaran, ada pada organisasi Masyumi. Organisasi berbentuk partai politik Islam pertama dan terbesar di masanya ini, pernah mengalami konflik dan melakukan penyelesaian konfliknya dengan baik. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh organisasi Masyumi menanggapi perjanjian Roem-Royen. Pendekatan yang digunakan studi ini adalah pendekatan manajemen konflik, spesifiknya yang membahas mengenai penyelesaian konflik. Metode studi ini adalah kualitatif dan studi pustaka. Hasil studi ini menunjukkan bahwa setelah perjanjian Roem-Royen menghasilkan kesepakatan antara pihak Indonesia dan Belanda, terjadilah konflik di internal Masyumi yang bersumber dari perbedaan persepsi antara dua pihak. Konflik ini berjenis konflik antar kelompok, penyelesaiannya dilakukan oleh para pimpinan Masyumi secara integratif melalui metode akomodasi dan kompromi, serta kedua pihak pada akhirnya menerima hasil dari perjanjian Roem-Royen.

**Kata Kunci:** Sumber Konflik, Jenis Konflik, Penyelesaian Konflik, Hasil Konflik, Perjanjian Roem-Royen.

**Conflict Resolution in Organization of Masyumi Regarding to The Roem-Van Roijen Agreement In 1949. Abstract:** A conflict in an organization always exists and cannot be avoided. It can lead to behavior deviating from rules, work procedure and disrupt the achievement of an organization if it is ignored. Therefore, it is necessary to manage and resolve a conflict well so that an organization remains productive to reach its targets. One of organizational resolutions whose lesson can be learnt is in Masyumi organization. This organization, forming as an Islamic political party, ever experienced a conflict and resolved it well. This study aims to describe a conflict resolution conducted by Masyumi regarding to the Roem-van Roijen agreement. It uses conflict management approach, specifically which discusses about conflict resolution. It uses qualitative and literature study method. Its result indicates that after Indonesian and Dutch parties finally made an agreement, called the Roem-van Roijen agreement, internal conflict occurred in Masyumi. It originated from different perceptions between two groups. It is classified as an inter-group conflict. Its resolution was conducted by Masyumi leaders integratively through accommodation and compromise methods. Both groups finally accepted the result of the Roem-van Roijen agreement.

**Key words:** Conflict sources, types of conflicts, conflict resolution, conflict results, Roem-van Roijen Agreement

## Pendahuluan

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang memiliki karakteristik yang beragam. Manusia mempunyai perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan atau adanya kesenjangan itulah yang dapat menimbulkan konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial bernegara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil seperti keluarga dan pertemanan.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya, konflik dapat memengaruhi performa kerja SDM karena konflik itu sendiri adalah energi yang mampu menggerakkan anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Konflik akan menjadi kekuatan apabila bersifat fungsional, artinya konflik mampu mengangkat isu tentang persoalan yang menghambat organisasi. Kemudian masalah yang ada dicarikan solusi, maka konflik tadi akan berdampak pada perbaikan kinerja SDM organisasi. Eksistensi konflik juga terjadi di organisasi Islam atau dakwah. Kita bisa melihat contoh, kasus konflik internal yang pernah terjadi pada organisasi Sarekat Islam. Menurut Noer dalam Anggit, Organisasi dakwah yang bergerak di bidang ekonomi dan politik ini mengalami konflik internal yang dipicu oleh adanya infiltrasi komunis ke tubuh SI melalui SI cabang Semarang. Paham komunis

tertanam di beberapa pengurus SI seperti Semaun, Darsono, dan Alimin Prawirodirdjo. Akhirnya SI terpecah, ada yang berhaluan sosialis komunis yang dipimpin Semaun (SI Merah) dan yang dipimpin Tjokroaminoto (SI Putih).<sup>2</sup> Menurut Muljono dalam Anggit pada mulanya Tjokroaminoto bersikap sebagai penengah, akan tetapi karena situasinya benar-benar buruk, maka pada Oktober 1921 anggota-anggota SI yang berhaluan komunis harus keluar dari keanggotaan organisasi.<sup>3</sup> Apabila sejak awal pimpinan SI telah menyadari adanya bibit-bibit konflik yang dapat memecah belah organisasi, kemudian segera mengatasinya, maka mungkin saja perpecahan atau konflik bisa diselesaikan atau setidaknya diminimalisir.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat pentingnya setiap organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen konflik termasuk organisasi dakwah. Jika konflik yang ada menghambat proses pencapaian tujuan organisasi, maka konflik tersebut bersifat disfungsional. Oleh sebab, itu perlu ada pendekatan manajemen konflik sehingga konflik yang arahnya pada tindakan negatif dapat diarahkan menjadi optimal sesuai dengan yang diharapkan organisasi.<sup>4</sup>

Dalam organisasi dakwah, terdapat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan dakwah. Dakwah sendiri menurut Musholi adalah merubah dan mengajak manusia dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik dengan menjalankan ajaran Islam untuk

<sup>1</sup>. Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 1-2.

<sup>2</sup>. Anggit Rizkianto, "Kepemimpinan Karismatik H.O.S. Tjokroaminoto di Sarekat Islam," *Jurnal Inteleksia*, Vol. 2, No. 1 (2020): 67, doi:

<http://www.inteleksia.stidalhadid.ac.id/index.php/inteleksia/article/download/71/32>

<sup>3</sup>. Ibid.

<sup>4</sup>. Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 90.

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>5</sup> Para ilmuwan membagi dakwah pada dua dimensi, yaitu dakwah struktural dan dakwah kultural. Menurut Ramli Ridwan dalam Syahrudin mengatakan bahwa dakwah struktural adalah aktivitas negara atau pemerintah dengan berbagai strukturnya untuk membangun tatanan masyarakat yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>6</sup>

Bila mengacu pernyataan-pernyataan di atas, partai politik yang menjalankan politik bernegara dengan didasarkan ajaran Islam juga dapat dikategorikan organisasi dakwah, seperti Partai Masyumi. Karena dalam Anggaran Dasarnya, organisasi tersebut bertujuan menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.<sup>7</sup> Sehingga, segala aktivitas dalam organisasi ini termasuk kategori dakwah. Termasuk juga menjalankan aktivitas politik kenegaraan, seperti membela tanah airnya agar benar-benar terlepas dari penjajahan yang merupakan sebuah kezaliman atau kemungkaran.

Masyumi berdiri pada tanggal 7-8 November 1945. Ketika itu para ulama dan aktivis Islam *Majelis Islam A'la Indonesia* (MAI) berkumpul untuk menyatukan tekad memperjuangkan aspirasi kaum muslimin

dalam satu wadah partai politik.<sup>8</sup> Masyumi merupakan badan federasi yang di dalamnya terdapat anggota biasa (perorangan) dan anggota luar biasa (kolektif) seperti Muhammadiyah dan NU. Sifatnya yang federatif inilah yang kemudian menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi berbentuk partai ini. Kekuatannya adalah berhasil menarik banyak kelompok Muslim untuk bergabung bersama. Namun, di balik itu juga sering muncul penonjolan semangat golongan yang pada momentum tertentu sempat mengalahkan semangat persatuan.<sup>9</sup> Partai Masyumi pernah menjadi partai terbesar di Indonesia, setidaknya hingga awal tahun 1950-an, yang dipengaruhi oleh peran organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah.<sup>10</sup> Pendiri dan pimpinan organisasinya merupakan tokoh-tokoh besar Islam Indonesia yang pada hari ini banyak dikenang sebagai pahlawan Nasional.

Menurut Natsir dalam Rahman, Masyumi memandang keterlibatannya secara langsung dalam kekuasaan negara sebagai suatu jalan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Dengan begitu, Islam bukan semata-mata religi dengan pengertian ruhaniah saja. Islam mengatur hubungan antara manusia dan Allah dan antar sesama manusia, Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik. Dalam masa revolusi umat Islam di Indonesia bukan saja dijiwai oleh aspirasi nasional, melainkan juga

5. Musholi, "Pengembangan Masyarakat dan Manajemen Dakwah", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol.9, No.2, (2017): 490, doi: <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/58>

6. Syahrudin, "Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultura Idalam Pembangunan Kota Palopo", *Jurnal Lentera*, Vol. IV, No. 1 (2020): 67, doi: <https://doi.org/10.21093/lentera.v2i2.1235>

7. Novianto Ari, "Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera)", *Jurnal Mozaik*, Vol. 08,

No.1 (2016): 81, doi: <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10769>

8. Ibid., 49-50.

9. Waluyo, *Dari "Pemberontak" Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*, di edit oleh M. Nursam (Yogyakarta: Ombak, 2009), 68.

10. Insan Fahmi Siregar, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)", *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 14, No.1, (2013): 101, doi: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/614>

aspirasi Islam.<sup>11</sup> Ketika masa awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan dengan agresi militer Belanda ke satu dan dua. Oleh sebab itu, diselenggarakanlah sebuah perundingan untuk mengatasi gejolak itu. Perundingan tersebut dikenal sebagai perundingan Roem-Royen dan hasil perundingannya dikenal menjadi perjanjian Roem-Royen. Mohammad Roem adalah salah satu pimpinan organisasi Masyumi saat itu. Perjanjian itu pada akhirnya membawa Indonesia menuju Konferensi Meja Bundar yang secara resmi membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Sehingga, Perjanjian Roem-Royen merupakan peristiwa penting yang menentukan nasib bangsa dan umat Islam Indonesia kala itu. Sehingga, aktivitas perundingan ini juga dapat dikatakan upaya perlawanan terhadap kemungkaran atau kezaliman penjajah yang jelas bertentangan dengan nilai Islam. Partai Masyumi yang berasaskan Islam melalui kadernya menjadi penentu hasil perundingan ini.

Hasil dari perundingan tersebut, kemudian memunculkan pertentangan di internal Masyumi. Pertentangan tersebut adalah karena adanya anggapan bahwa Roem menjadi delegasi perjanjian tidak sesuai dengan prosedur seharusnya, dan hasil perjanjiannya pun tidak memuaskan sebagian kalangan yang ada di internal Masyumi. Pertentangan itu pada akhirnya bisa diatasi dengan baik oleh para pimpinan Masyumi, sehingga tidak menjadi masalah yang membuat perpecahan serius dalam internal organisasi. Penyelesaian konflik dalam kasus ini penting untuk dipelajari

suatu organisasi khususnya organisasi dakwah. Sebab dalam penyelesaian kasus ini terdapat pelajaran dari para tokoh terdahulu dalam menanggapi konflik secara etis tanpa mengorbankan persatuan. meskipun kondisi atau situasinya pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang jelas berbeda dengan masa sekarang, namun kita bisa mengambil prinsip *sunatullah* dari konflik dan penyelesaiannya sehingga tetap dapat berguna meskipun berbeda masa.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi sumber, jenis, dan metode perihal penyelesaian konflik yang terjadi di internal Masyumi dalam menanggapi proses dan hasil perjanjian Roem-Royen. Sehingga, masalah-masalah di luar variabel tersebut tidak akan dibahas dalam studi ini. Menurut Stevenin dalam Handoko (2001:48), Setidaknya ada lima langkah untuk menyelesaikan konflik, apapun sumber masalahnya, lima langkah ini bersifat mendasar untuk mengatasinya; a) Pengenalan terhadap masalah, jangan sampai menganggap sesuatu adalah masalah padahal bukan masalah, atau sebaliknya sesuatu itu adalah masalah tapi diabaikan; b) Mendiagnosis masalah dengan instrument siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana konflik tersebut terjadi; c) Kemudian menyepakati suatu solusi untuk memecahkan konflik atau masalah tersebut; d) Melaksanakan solusi yang telah disepakati dan ditetapkan; e) Evaluasi hasil dari penyelesaian, apakah solusi pemecahan berhasil atau menciptakan masalah baru.<sup>12</sup> Sehingga, pembahasan yang akan disajikan antara lain: suasana atau kondisi yang terjadi

---

<sup>11</sup> Rahman, "Masyumi dalam Konstelasi Politik Orde Lama," (Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Makassar, 2017),160, doi: <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/3998>

<sup>12</sup> Mohamad Muspawi, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)", Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 16, No. 2, (2014): 44.

di Indonesia maupun internal Masyumi sebelum; saat; dan sesudah perjanjian Roem-Royen ini diselenggarakan; siapa saja subjek yang berkonflik; jenis konfliknya seperti apa; sumbernya apa; metode penyelesaian apa; dan hasil konfliknya bagaimana; dari hasil perjanjian Roem-Royen yang memicu konflik di internal Masyumi. Sehingga, Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna bagi organisasi dakwah ataupun manajer organisasi dakwah khususnya yang bergerak di dakwah struktural sebagai wawasan terkait sumber dan jenis konflik yang berpotensi muncul, sehingga bisa menjadi pelajaran atau hikmah dalam mengatasi konflik internal apabila muncul dikemudian hari. Kalaupun muncul konflik, mereka dapat menyelesaikan atau mengelolanya dengan baik, demi menjaga produktivitas organisasi. Kemudian, hasil studi ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi dalam pengembangan studi manajemen dakwah terutama persoalan manajemen konflik.

Sebelumnya, telah ada studi terdahulu yang membahas mengenai manajemen konflik ataupun permasalahan yang ada dalam Masyumi. Seperti artikel berjudul "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945 – 1960)" yang menjelaskan tentang dinamika sejarah pertumbuhan dan perkembangan partai Masyumi hingga bubarnya pada tahun 1960.<sup>13</sup> Artikel tersebut menekankan pada sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi

Masyumi, tidak berfokus pada konflik yang terjadi dalam organisasi Masyumi akibat perjanjian Roem-Royen. Selanjutnya, artikel yang dikarang Moh Amirul Mukminin berjudul " Hubungan NU dan Masyumi (1945-1960) Konflik dan Keluarnya NU dari Masyumi".<sup>14</sup> Studi tersebut mendeskripsikan hubungan antara NU dan Masyumi yang memfokuskan pembahasan tentang struktur NU di Masyumi, konflik dan keluarnya NU dari Masyumi, dan peran NU setelah keluar dari Masyumi. Berbeda dengan studi ini, karena tulisan tersebut tidak menjelaskan bagaimana penyelesaian konfliknya. Kemudian ada jurnal yang berjudul "Friction in Masyumi: A Historical Studies on Internal Conflict Event of Islamic Party in Indonesia, 1945-1960."<sup>15</sup> Artikel jurnal ini, mendeskripsikan adanya dominasi satu kelompok dalam Masyumi yang akhirnya memicu konflik internal. Namun, tidak dijelaskan pemecahan atau penyelesaian konfliknya seperti apa. Terakhir, artikel jurnal dengan judul "Konflik Internal Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur".<sup>16</sup> Jurnal ini, menjelaskan mengenai sejarah konflik yang terjadi dalam organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur, seperti sejak kapan konflik di organisasi ini muncul dan apa hal yang dikonflikkan. Jurnal tersebut juga berbeda dengan apa yang akan dibahas dalam studi ini, karena di jurnal tersebut tidak ada penjelasan mengenai cara penyelesaiannya, sedangkan studi ini berfokus pada deskripsi penyelesaian konflik.

<sup>13</sup>. Ibid., 88.

<sup>14</sup>. Moh Amirul Mukminin, "Hubungan NU dan Masyumi (1945-1960) Konflik dan Keluarnya NU dari Masyumi", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 3, No. 3, (2015): 487, doi: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avata/ra/article/view/12808/11801>

<sup>15</sup>. Achmad Hidayat dan Setia Gumilar, "Friction in Masyumi: A Historical Studies on Internal Conflict

Event of Islamic Party in Indonesia, 1945-1960", *International Journal for Historical Studies*, Vol.8, No.1, (2016): 59-68, doi: <https://doi.org/10.2121/tawarikh.v8i1.719>

<sup>16</sup>. Supri, dkk. "Konflik Internal Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur", *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)*, Vol. 1, No.2, (2019): 1-9, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/54533>

Studi ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Harahap, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Sedangkan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir.<sup>18</sup> Studi kepustakaan menjadi pilihan karena studi ini membahas mengenai sejarah dan datanya bergantung pada sumber kepustakaan yang bersifat sekunder dan kualitatif. Sumber data yang akan digunakan dalam studi ini, menggunakan sumber sekunder bertemakan sejarah tentang Masyumi ataupun tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Sumber datanya antara lain adalah buku berjudul Partai Masyumi yang dikarang oleh Remy Madinier, Nasionalisme & Revolusi Indonesia yang ditulis George McTurhan Kahin, tulisan Yusril Ihza Mahendra yang berjudul Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik Islam, Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia yang dikarang Waluyo, serta artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan Partai Masyumi maupun konflik internal terkait hasil perjanjian Roem-Royen. Sumber-sumber tersebut menyajikan data tentang sejarah dan dinamika Masyumi selama masih aktif

sebagai suatu organisasi termasuk adanya konflik pasca hasil perjanjian Roem-Royen dan gambaran penyelesaiannya. Teknik analisis datanya pertama mereduksi data-data yang ditemukan kemudian memilih mana yang perlu dianalisis atau tidak sesuai dengan rumusan masalah, kemudian data akan disajikan secara deskriptif, dan terakhir akan ditarik kesimpulan dari data-data yang telah ditemukan untuk menjawab rumusan masalah dari studi ini. Data-data yang terkumpul tadi diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber, yakni dengan Menyintesis data dari berbagai sumber.<sup>19</sup>

## Teori Konflik

### 1. Definisi Konflik

Menurut Cummings yang dikutip oleh Wahyudi (2011), konflik merupakan suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau betentangan dalam pendapat atau tujuan mereka.<sup>20</sup> Menurut Wijono dalam Wahyudi, unsur-unsur konflik adalah sebagai berikut: (a) Ada dua pihak secara perseorangan ataupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan; (b) Timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan ataupun kelompok satu organisasi dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan; (c) Munculnya interaksi yang ditandai dengan perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat

<sup>17</sup> Nusapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 1, (2014): 1, doi: <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>

<sup>18</sup> Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15, No. 1, (2011): 134, doi: <http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>

<sup>19</sup> Bachtiar Bachri, "Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, (2010): 55.

<sup>20</sup> Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 17.

memperoleh keuntungan, seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang-pangan materi dan kesejahteraan atau tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis, seperti rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri; (d) Munculnya tindakan yang saling berhadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.<sup>21</sup> Maka, bisa ditarik kesimpulan bahwa konflik merupakan pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Entitas konflik itu sendiri dapat diidentifikasi dengan memahami unsur-unsur konflik yang sudah disebutkan di atas.

## 2. Sumber-Sumber Konflik

Agar konflik dapat berdampak positif bagi organisasi, maka harus dikelola secara baik dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.<sup>22</sup> Adapun penyebab atau sumber konflik dari dalam organisasi adalah sebagai berikut, *pertama*, keterbatasan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi, ada batasnya, tidak semua kebutuhan terpenuhi sehingga sering menimbulkan persaingan dan pertentangan antar unit kerja untuk memanfaatkan sumber daya tersebut.<sup>23</sup> *Kedua*, kegagalan komunikasi, disebabkan proses komunikasi tidak dapat berlangsung baik, pesan sulit dipahami oleh bawahan karena perbedaan pengetahuan, kebutuhan, dan nilai-nilai yang diyakini masing-masing.<sup>24</sup> *Ketiga*, perbedaan nilai-nilai dan persepsi. Setiap anggota mewarisi nilai-nilai berdasarkan latar belakang kehidupannya yang menjadi

pandangan hidup sehingga memengaruhi perilaku dalam bekerja. Konflik sering kali terjadi karena adanya perbedaan nilai yang saling berlawanan.<sup>25</sup> *Keempat*, gaya individual. Ada orang-orang tertentu yang menyukai konflik, debat, dan argumentasi, dan hal tersebut dapat memicu suatu konflik tertentu yang disebabkan sifat-sifat individu tersebut.<sup>26</sup>

Sumber-sumber di atas, dapat dijadikan sebagai pijakan dalam memahami sumber konflik yang terjadi di dalam organisasi. Dengan begitu, pimpinan organisasi dapat menentukan cara yang tepat untuk mengelola konflik agar aktivitas organisasi tetap produktif. Dalam studi ini, dapat dieksplorasi sumber-sumber konflik yang terjadi di Partai Masyumi dalam menanggapi perjanjian Roem-Royen.

## 3. Jenis-Jenis Konflik

Konflik memiliki jenis-jenisnya, setiap pakar konflik memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam klasifikasi jenisnya. Menurut Handoko T.H. dalam Wahyudi, (2011), konflik ada lima jenis, yaitu: (a) Konflik dalam diri individu. Kepentingan individu seringkali berbeda dengan tujuan organisasi; (b) Konflik antar individu dalam organisasi. Perbedaan antar individu dapat menjadi konflik tersendiri; (c) Konflik antar individu dengan kelompok. Konflik bisa muncul karena kegagalan individu dalam menjalankan fungsi yang ditetapkan kelompok; (d) Konflik antar kelompok, dapat terjadi karena persaingan dan pertentangan kepentingan kelompok; (e) Konflik antar

<sup>21</sup>. Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan", *Jurnal Unita*, Vol. 8, No. 1, (2015): 3-4, doi: <http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/45>

<sup>22</sup>. Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, 42.

<sup>23</sup>. Ibid., 96.

<sup>24</sup>. Ibid.

<sup>25</sup>. Ibid.

<sup>26</sup>. Ibid., 73.

organisasi, misalnya akibat persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara.<sup>27</sup>

Dengan mengetahui jenis konfliknya, pimpinan organisasi dakwah dapat menentukan cara yang tepat dalam mengelola konflik. Akan berbeda cara mengelola konflik antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Sehingga, studi ini juga akan menerangkan jenis konflik yang ada di Partai Masyumi dari kasus perjanjian Roem-Royen.

#### 4. Penyelesaian Konflik

Menurut Stevenin dalam Handoko (2001:48), ada lima langkah untuk menyelesaikan konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah ini bersifat mendasar dalam mengatasi konflik: (a) Pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang nampak dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Kadang kala yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mepedulikan masalah atau menganggap ada masalah namun sebenarnya tidak ada); (b) Diagnosis. Metode yang benar dalam memahami konflik dengan instrumen siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil diketahui. Pusatkan perhatian pada masalah utama bukan pada hal-hal sepele; (c) Menyepakati suatu solusi. Kumpulkan semua masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari pihak yang terlibat konflik. Singkirkan penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak realistis; (d) Pelaksanaan. Akan selalu ada peluang keuntungan dan kerugian dalam sebuah keputusan, jangan biarkan pertimbangan ini

memengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu yang berkonflik; (e) evaluasi. Penyelesaian itu bisa saja melahirkan masalah baru. Jika penyelesaian yang sebelumnya tidak berhasil, bisa dilihat apakah ada proses sebelumnya yang keliru, atau bisa kembali menjalankan langkah-langkah sebelumnya.<sup>28</sup>

#### 5. Metode Penyelesaian Konflik

Metode penyelesaian konflik yang banyak digunakan adalah, *pertama*, dominasi. Metode ini berusaha menekan konflik bukan menyelesaikannya. Dengan cara memaksakan, konflik diharapkan reda dengan sendirinya. Hasil dari metode ini adalah ada situasi menang-kalah, pihak yang kalah harus menerima kenyataan bahwa pihak lain mempunyai otoritas yang lebih tinggi. Cara-caranya bisa dengan membujuk secara sepihak untuk mengikuti kemauan satu kelompok yang lebih dominan dan mengadakan pemungutan suara.<sup>29</sup> Sehingga, bisa ditarik unsur-unsur yang terdapat dalam metode ini adalah: ada pihak yang berkonflik, ada paksaan atau kekuatan yang lebih unggul di satu pihak, ada pihak yang menang (kekuatannya lebih dominan), ada pihak yang kalah (kekuatannya lebih lemah). *Kedua*, kompromi. Penyelesaian dengan jalan menghimbau pihak yang terlibat konflik untuk mengorbankan tujuan masing-masing. Bisa dilakukan dengan cara memisahkan pihak yang konflik hingga dicapai satu pemecahan, melalui arbitrase, menggunakan imbalan yang diberikan kepada salah satu pihak konflik.<sup>30</sup> Adapun unsur-unsurnya adalah ada pihak yang terlibat konflik, masing-masing pihak menoleransi kondisi masing-masing, masing-

<sup>27</sup> Ibid., 31-33.

<sup>28</sup> Mohamad Muspawi, *Manajemen Konflik*, 44.

<sup>29</sup> Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, 63-64.

<sup>30</sup> Ibid.



masing menawarkan suatu penawaran, masing-masing mengurangi tuntutan, tidak ada pihak yang menang atau kalah, masing-masing tidak mendapatkan apa yang diinginkan secara penuh dan juga tidak kehilangan sepenuhnya.

*Ketiga*, pemecahan problem secara integratif. Metode ini dapat mengalihkan konflik antar kelompok menjadi sebuah situasi pemecahan masalah bersama. Pihak yang berkonflik mencoba memecahkan persoalan dan hasilnya diterima bersama. Caranya bisa dengan konsensus, konfrontasi membandingkan pendapat masing-masing, dan penggunaan tujuan superordinat sebagai tujuan bersama yang lebih tinggi dari pada kepentingan kelompok.<sup>31</sup> Sehingga, metode ini menggunakan gabungan metode-metode lainnya sebagai kesatuan cara untuk mengatasi konflik tertentu. Dari situ bisa kita pahami unsur-unsur yang ada antara lain: ada pihak yang terlibat konflik; ada upaya memecahkan persoalan dan pemecahan tersebut diterima oleh masing-masing pihak; menggunakan salah satu; dua atau ketiga cara yang dijelaskan tadi. Metode-metode di atas, dapat dijadikan sebagai pedoman analisis untuk membaca metode yang digunakan Masyumi dalam menyelesaikan konflik kasus perjanjian Roem-Royen.

## 6. Hasil-Hasil Konflik

Hasil-hasil konflik terdiri dari tiga kategori, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup> *pertama*, Kalah-Kalah. Pendekatan penyelesaian yang menghasilkan kondisi kalah-kalah, membuat

tidak ada pihak yang mencapai keinginannya (kedua pihak dalam kondisi kalah). Hasil ini terjadi, apabila konflik diselesaikan dengan sikap menghindar, akomodasi, meratakan dan atau melalui kompromi. *Kedua*, Menang-Kalah. Salah satu pihak yang terlibat konflik bermaksud untuk menyusun berbagai kekuatan agar menang dari pihak lainnya. Bisa dicapai melalui kekuatan, keterampilan yang superior, atau adanya dominasi. *Ketiga*, Menang-Menang. Konflik yang memberikan keuntungan semua pihak yang terlibat konflik. Misalkan, dengan cara konfrontasi kemudian pemecahan yang ada dilakukan bersama untuk mengatasi pertentangan yang ada. Konsepsi hasil-hasil konflik sebagaimana dijelaskan di atas, dapat digunakan dalam studi ini untuk mendeskripsikan hasil yang didapatkan pihak-pihak yang berkonflik di Partai Masyumi dalam kasus perjanjian Roem-Royen.

## Sistem Pemerintahan Negara

Menurut Adolf dalam Moch. H. Kharismulloh, Negara adalah suatu organisasi dalam masyarakat yang sudah memenuhi semua unsur yang harus ada dalam suatu negara. Dalam ketentuan Konvensi Montevideo tahun 1933, disebutkan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan sebagai sebuah negara bila sudah mempunyai unsur-unsur yaitu: penduduk yang tetap; wilayah tertentu; pemerintah yang berdaulat; kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya; dan pengakuan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>. Ibid.

<sup>32</sup>. Juliana Lumintang, "Dinamika Konflik dalam Organisasi", *E-Journal Acta Diurna*, Vol. IV, No. 2, (2015): 7-8, doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnako/munikasi/article/view/7255/6758>

<sup>33</sup>. Moch. H. Kharismulloh, "Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948-1948 dalam Perspektif Fiqh Siyash dan Hukum Tata Negara", *Al-Mazahib*, Vol.3, No.1, (2015): 175, doi: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1387>

Menurut Mahfud MD dalam Gede dkk, wacana sistem pemerintahan landasannya adalah pembagian kekuasaan negara. Di samping itu, materi konstitusi tentang wewenang dan bekerjanya Lembaga-lembaga negara juga disebut sebagai sistem pemerintahan negara. Di pandang dari sudut penataan kekuasaan negara, kemudian ditegaskan bahwa sejarah pembagian kekuasaan negara diawali oleh adanya pemisahan kekuasaan.<sup>34</sup> Menurut John Locke, kekuasaan Negara dibagi tiga kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan federatif yang masing-masing terpisah. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan pengadilan, dan federatif berfungsi sebagai kekuasaan yang berhubungan dengan keamanan negara dalam kaitan hubungan luar negeri.<sup>35</sup> Dengan demikian, Mahfud MD mengemukakan bahwa dilihat dari segi cara bekerja dan berhubungan, ketiga kekuasaan negara tersebut dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan negara. Sehingga, sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara Lembaga-lembaga negara.<sup>36</sup>

Selain terjadinya hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga internal negara, suatu negara juga dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Dengan kata lain, adanya jalinan antar negara yang biasanya diwakilkan oleh perwakilan diplomasi suatu negara. Menurut Roy dalam Subehan, diplomasi berasal dari

Bahasa Yunani Kuno (*diplooun*) yang artinya melipat, (*diploma*) yang artinya perjanjian perdamaian. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu penandatanganan naskah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melewati jalan milik negara dan surat-surat yang dicetak pada piringan logam dobel dan dijahit menjadi satu dengan cara-cara tertentu.<sup>37</sup> Menurut Abdul Azis dalam Subehan, dalam perkembangannya kata ini diserap ke Bahasa Latin menjadi perjanjian perdamaian kerjasama bangsa Romawi dengan suku bangsa asing di luar Romawi.<sup>38</sup> Kondisi sebuah negara tidak selamanya akan terus stabil, kondisi darurat dimungkinkan terjadi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Berkaitan dengan keadaan darurat tersebut penguasa dapat membuat keputusan-keputusan yang menyimpang atau tidak ada dalam aturan negaranya. Menurut Herman dalam Kharismulloh, berdasarkan teori *staatsnoodrecht* di mana negara dalam keadaan bahaya, ukuran-ukuran tindakan penguasa adalah didasarkan kepada pertimbangan obyektif di luar peraturan, dan penguasa memaklumi bahwa tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelamatkan negara dari ancaman bahaya.<sup>39</sup>

## Profil Masyumi

Masyumi terbentuk dalam dua suasana dan dua pilihan. *Pertama*, suasana revolusi Indonesia. *Kedua*, suasana persaingan antara berbagai kelompok atau golongan

<sup>34</sup> Gededkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), 88.

<sup>35</sup> Ibid., 88.

<sup>36</sup> Ibid., 89.

<sup>37</sup> Subehan Khalik, "Hubungan-Hubungan Internasional di Masa Damai", *Al-Daulah*, Vol. 3, No.2,

(2014): 237, doi: [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1508](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1508)

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Kharismulloh, "Pembentukan Pemerintahan Darurat", 177.

politik dalam masyarakat Indonesia. Suasana revolusi dimulai ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, dilanjutkan dengan perang kemerdekaan dan perjuangan diplomasi selama kurang lebih empat tahun dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara.<sup>40</sup>

Dalam mempertahankan negara baru itu, berbagai kelompok politik saling bersaing merebut kekuasaan dan pengaruh. Persaingan itu tidak jauh-jauh dari pertarungan ideologi. Tiga kelompok kuat yang bersaing pada saat itu adalah Islam, Nasionalisme Sekuler, dan Komunisme.<sup>41</sup> Tujuan dibentuknya Partai Masyumi adalah “Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan, hingga mewujudkan susunan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan masyarakat, yang berdasar keadilan menurut ajaran-ajaran Islam”. Dan menurut Yusril Ihza Mahendra, Partai Masyumi dibentuk dengan tujuan; *Pertama*, menegakkan kedaulatan negara RI dan agama Islam. *Kedua*, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. *Ketiga*, melenyapkan kolonialisme dan imperialisme.<sup>42</sup>

Dalam kepengurusan awal kali pada tahun 1945, unturnya mencakup berbagai golongan umat Islam. Dalam Majelis Syuro, ketua adalah Hasyim Asyari (NU dan Wakilnya Wahid Hasyim (NU), Agus Salim (PSII), Syekh Djamil Djambek (Pembaharu

dari Sumatera Barat), sedangkan pengurus besar terdiri dari para politisi karier, seperti Soekiman, Abikusno, Natsir dan M.Roem.<sup>43</sup> Adapun pada tahun 1949 Pimpinan Pusat Masyumi antara lain, Presiden: Soekiman, Wakil Ketua I Presidium: Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua II Presidium: Jusuf Wibisono, Ketua: Natsir, Wakil Ketua I: Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua II: M. Roem.<sup>44</sup>

Masyumi memiliki dua kategori keanggotaan, yakni anggota biasa (perorangan), dan anggota luar biasa (kolektif) seperti Muhammadiyah dan NU. Sifatnya yang federatif ini, menjadi sumber kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya karena dapat menarik organisasi dan kelompok muslim untuk bergabung bersama Masyumi dalam menegakan Islam bersama-sama, tidak memandang latar belakang aliran keislaman. Sedangkan, kelemahannya apabila terdapat semangat golongan yang lebih kuat dari pada kesatuan partai, yang pada dapat memunculkan pertentangan dan ketegangan di dalamnya.<sup>45</sup>

## Penyelesaian Konflik Internal Masyumi Menanggapi Hasil Perjanjian Roem-Royen

Walaupun negara Republik Indonesia sudah diproklamirkan dan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun kenyataannya beberapa tahun berselang, pihak Belanda belum mau mengakui negara yang baru lahir

40. Yusrilhza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, diterjemahkan oleh Munim A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 1999), 66.

41. *Ibid.*, 67.

42. Novianto Ari, *Islam dan Demokrasi*, 81.

43. Argenti. “Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia”, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 5, No. 1,

(2020): 48, doi: <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3731>

44. Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), 99.

45. Waluyo, *Dari “Pemberontak” Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*, diedit oleh M.Nursam (Yogyakarta: Ombak, 2009), 68.

tersebut. Tentara *NICA (Netherlands Indies Civil Administration)* yang diboncengi tentara sekutu ingin menguasai kembali wilayah kolonialnya di nusantara, sehingga Belanda sempat melakukan dua kali agresi militernya di wilayah Indonesia. Pada Agresi militer Belanda kedua, mereka berhasil menguasai Ibu Kota Yogyakarta dan mengasingkan Presiden, Wakil Presiden, serta para pejabat tinggi Republik Indonesia lainnya.<sup>46</sup>

Menurut Mestika dalam Kharismulloh, sebelum Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditawan, mereka mengirimkan radiogram kepada Syafrudin Prawiranegara. Isinya adalah meminta kepada Syafrudin Prawiranegara, Menteri kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatera.<sup>47</sup> Hal itu menunjukkan bahwa kondisi Indonesia saat itu dalam keadaan darurat, sehingga penguasa (Soekarno) memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Syafrudin Prawiranegara. Namun, menurut Ajip dalam Kharismulloh yang menjadi sasaran serangan tentara Belanda di Yogyakarta adalah memusnahkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi. Sehingga, radiogram itu tidak pernah sampai ke alamat yang dituju.<sup>48</sup>

Menurut Chairul dalam Kharismulloh, embrio terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berawal dari

pembicaraan Syafrudin Prawiranegara dan Teuku Mohammad Hasan. Tindakan Syafrudin itu, bukan berdasarkan mandat yang dikirim oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, melainkan murni inisiatif sendiri dan pemimpin setempat. Sehingga, kemudian eksistensinya terdapat titik temu antara legalitas pusat dan inisiatif lokal. Itulah kenapa Syafrudin menamakan dirinya sebagai ketu PDRI bukan Presiden.<sup>49</sup>

Pada tahun 1948, agresi Militer Belanda II memicu reaksi dunia internasional dan Dewan Keamanan PBB (Liga Bangsa-Bangsa) sekarang bernama PBB, yang mendesak agar dibuka perundingan antara Belanda dan Indonesia. Pihak Belanda diwakili oleh Van Royen bersedia untuk mengadakan perundingan yang dilaksanakan di hotel *des indes* bersama pihak Indonesia yang diwakilkan Moh. Roem.<sup>50</sup>

Menurut Mestika dalam Kharismulloh, pada saat itu Belanda mengajukan syarat hanya mau berunding dengan pemimpin Republik Indonesia yang ditawan, bukan dengan PDRI. Dari situlah, muncul dilema di kalangan pemimpin Republik Indonesia, dalam memutuskan yang berhak mewakili Republik dalam perundingan, PDRI sebagai pemerintahan yang sah atau pemimpin yang sedang ditawan. Soekarno dan Hatta akhirnya mengutus Roem sebagai perwakilan RI, meskipun ada keberatan dari pihak PDRI, tentara Indonesia, dan oposisi

<sup>46</sup>. Agus Budiman, "Sejarah Diplomasi Roem-Rojen Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949," *Jurnal Unigal* Vol.4, No. 1, (2017): 87-88, doi: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp/article/view/388>

<sup>47</sup>. Kharismulloh, *Pembentukan Pemerintahan Darurat*, 166.

<sup>48</sup>. Ibid.

<sup>49</sup>. Kharismulloh, *Pembentukan Pemerintahan Darurat*, 167.

<sup>50</sup>. Tasnur dan Rijal, "Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)," *Jurnal Candra sangkala*, Vol. 5, No.2, (2019): 64, doi: <http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v5i2.6599>

Pemerintah saat itu termasuk di dalamnya Partai Masyumi.<sup>51</sup> Sepertinya, desakan dari Belanda itulah yang membuat Roem mau tidak mau menjadi delegasi dari pemerintah pusat yang ditawan di samping adanya PDRI. Perundingan ini dimulai pada 14 April 1949 dengan pengawasan dari PBB yang membentuk *United Nations Commissions For Indonesia* (UNCI). Selain Roem yang menjabat sebagai delegasi Indonesia, ada juga Natsir yang menjabat sebagai penasihat.<sup>52</sup> Pada akhirnya, tanggal 7 Mei 1949 tercapailah kesepakatan antara RI dan Belanda dalam perundingan yang ditandatangani oleh Roem dan Royen. Dalam perundingan tersebut Delegasi Indonesia Mohammad Roem mengemukakan kesediaannya untuk; (a) Mengeluarkan perintah kepada penganut-penganut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya; (b) Kerjasama untuk memulihkan dan mempertahankan ketertiban dan keamanan; (c) Turut serta dalam KMB dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan rakyat kepada Negara Indonesia Serikat yang penuh dan tanpa syarat.

Selanjutnya, Delegasi Belanda yang diwakili oleh van Royen menyatakan kesediaannya untuk: (a) Menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta; (b) Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik; (c) Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik; (d)

Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari NIS (Negara Indonesia Serikat); (e) Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.<sup>53</sup> Demikianlah hasil dari perjanjian Roem-Royen.

Perundingan tersebut ternyata menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan di Indonesia maupun Belanda. Di Indonesia, perundingan tersebut juga dipermasalahkan oleh Partai Masyumi yang merupakan partai dari Mohammad Roem. Menurut Roem, perjanjian yang dilakukannya dapat membuka pintu bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingannya. Roem menganggap bahwa keputusan tersebut bukanlah keputusan akhir. Roem yakin bahwa kembalinya pemerintah ke Yogyakarta akan menuju kepada pengakuan dari segenap dunia terhadap eksistensi RI. Secara internasional, kedudukan RI akan bertambah kuat dibanding sebelumnya, dan kedudukan inilah yang perlu dimanfaatkan untuk menghadapi perundingan dengan Belanda selanjutnya.<sup>54</sup>

Sedangkan, Mohammad Natsir dan beberapa orang lainnya dari Masyumi berpendapat bahwa, Roem sebagai ketua Delegasi RI mendapatkan mandat dari Soekarno dan Hatta yang tidak memiliki wewenang lagi karena pada waktu itu mereka tidak memiliki legitimasi sebagai seorang presiden dan wakil presiden, mereka berdua sedang ada dalam tahanan

<sup>51</sup>. Kharismulloh, *Pembentukan Pemerintahan Darurat*, 164.

<sup>52</sup>. AlfiHafidh, "Dinamika Partai Masyumi pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)", *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No.

2, (2015): 40, doi: <http://doi.org/10.25273/aisp.v5i02.885>

<sup>53</sup>. Agus Budiman, *Sejarah Diplomasi Roem-Rojen*, 96-97.

<sup>54</sup>. Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 194.

Belanda.<sup>55</sup> Mandat itu tidak sah, secara resmi Soekarno-hatta telah menyerahkan “mandat penuh” kepada Sjafruddin Prawiranegara dari Masyumi untuk membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Sumatera Barat sebelum kedua tokoh itu ditangkap oleh Belanda. Sehingga, kedudukan Roem sebagai delegasi lemah, karena Belanda akan dengan mudah memaksakan kehendaknya.<sup>56</sup>

Dan menurut Natsir, hasil perjanjian Roem-Royen, seharusnya dirundingkan dahulu kepada Sjafruddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI. Perundingan tersebut juga dinilai terlalu dini untuk diselesaikan. Natsir beranggapan lebih baik apabila perkembangan pembicaraan disampaikan dahulu kepada PBB, sehingga nantinya delegasi dapat mengulur waktu untuk memantapkan kedudukan, karena mengingat gerilyawan di daerah-daerah pada saat agresi militer itu semakin kuat.<sup>57</sup>

Sjafruddin sebagai ketua PDRI sekaligus tokoh Masyumi waktu itu merasa marah dan merasa tidak dianggap setelah mendengar adanya perundingan dengan Belanda tanpa seizin PDRI. Dia merasa dilangkahi karena menurutnya, jika pihak Republik terpaksa menempuh jalan perundingan, maka sebaiknya perundingan dilakukan oleh pemimpin PDRI yang saat itu resmi memegang mandat pemerintahan, sebab mereka yang mengetahui kekuatan Republik. Sjafruddin mengancam

perundingan tersebut dan menyatakan tidak setuju dengan hasil-hasil yang dicapai di dalamnya.<sup>58</sup> Penyesalan lain dari Sjafruddin terhadap perundingan Roem-Royen adalah karena dalam perundingan-perundingan sebelumnya Indonesia selalu dirugikan.<sup>59</sup>

Dengan mempertahankan sikap yang menentang keabsahan pemerintah, Sjafruddin secara terbuka menyampaikan penyesalannya atas persetujuan Roem-Royen, sebagaimana isi perjanjian yang telah dijelaskan sebelumnya dia mengatakan “*isinya terlalu lemah dan tidak mencerminkan kekuatan perlawanan PDRI, karena kita sebenarnya jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh orang-orang di Bangka (tempat Soekarno dan Hatta ditahan oleh Belanda)*”.<sup>60</sup>

Mohammad Roem menanggapi pendapat Natsir dkk. Menurutnya, Soekarno dan Mohammad Hatta masih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kabinet Hatta juga masih tetap ada walaupun tidak dapat menjalankan tugasnya. Tugas tersebut dilakukan oleh PDRI. Menurut Roem, kedudukan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia juga tetap diakui oleh Dewan Keamanan PBB. Ketika itu PDRI juga sengaja tidak dihubungi karena demi menjaga rahasia dan keamanan mereka agar tidak diketahui oleh Belanda.<sup>61</sup> Menurut Deliar Noer dalam Faridah, Natsir yang merupakan pimpinan Masyumi yang sedang menjabat sebagai Menteri

<sup>55</sup> Yusrihza, *Modernisme dan Fundamentalisme*, 128-129.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Yusri Indra dkk. “Peran Sjafruddin Prawira Negara dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI dari Agresi Militer Belanda II di Riau, Tahun 1948-1949”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 4, No.1, (2017): 10, doi:

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/view/12661>

<sup>59</sup> George McTurnan Kahin, *Nasionalisme & Revolusi Indonesia* di terjemahkan oleh Tim Komunitas Bambu (New York: Cornell University Press, 1952), 541.

<sup>60</sup> Remy Madinier, *Partai Masyum: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*, diterjemahkan oleh Tonny Pasuhuk (Jakarta: Mizan, 2013), 102.

<sup>61</sup> Ibid.

Penerangan sekaligus delegasi meletakkan jabatannya karena tetap tidak sepakat dengan prosedur perjanjian Roem-Royen yang menurutnya tidak sesuai prosedur seharusnya. Ia merasa bahwa tantangan akan terlalu berat dan bahkan tidak sanggup untuk mempertahankan hasil perundingan tersebut di hadapan partainya, Masyumi.<sup>62</sup>

Sjafruddin berkomentar terhadap peranan Roem dalam perjanjian tersebut: *"Hanya sekali dia menyeleweng. Yakni tatkala dia menjalankan perintah atas permintaan Sukarno yang waktu itu bukan menjabat Presiden, karena sedang dalam pembuangan untuk berbicara dengan van Roijen, yang menghasilkan apa yang lazim disebut 'persetujuan Roem-van Roijen'"*.<sup>63</sup>

Salah satu alasan di tengahnya kesepakatan Roem-Royen oleh Natsir dan Sjafruddin bisa berhubungan dengan yang dialami oleh Jenderal Sudirman. Sebab, pada saat agresi militer Belanda tersebut Jenderal Sudirman beserta angkatan bersenjata dan laskar-laskar rakyat berada pada posisi yang menguntungkan untuk memukul mundur pasukan Belanda di Yogyakarta.<sup>64</sup>

### 1. Subyek dan Jenis Konflik Kasus Perjanjian Roem-Royen

Terdapat dua pihak yang terlibat dalam interaksi yang bertentangan. Yakni pihak yang pro dan kontra terhadap hasil perundingan yang dilakukan oleh salah satu kader Masyumi, yakni Roem. Pihak yang berkonflik di sini adalah Roem sendiri sebagai delegasi perundingan, Natsir sebagai pimpinan Masyumi dan Sjafruddin sebagai ketua PDRI sekaligus pimpinan Masyumi.

Roem membela hasil perundingan di hadapan Partai, sedangkan Natsir dan Sjafruddin tidak sepakat dengan hasilnya. Dilihat dari jenisnya, konflik ini bisa diidentifikasi konflik antar kelompok yang diwakilkan oleh para pemimpin kelompoknya yakni kelompok Roem dan kelompok Natsir-Sjafruddin. Dari penjelasan di atas, mungkin tidak terlihat jelas siapa saja kelompok Roem, tapi bisa kita identifikasi melalui penjelasan selanjutnya bahwa akan ada rapat yang di dalamnya terdapat pihak yang pro dan kontra, yang pro dipimpin oleh Roem dan kontra dipimpin oleh Natsir. Dua kelompok ini, mempertentangkan masalah perjanjian Roem-Royen yang masing-masing berbeda pendapat sebagaimana argumen-argumen yang dilontarkan di atas tadi.

### 2. Sumber Konflik pada Kasus Perjanjian Roem-Royen

Bila kita identifikasi permasalahan yang dipertentangkan kedua belah pihak di atas, dapat diketahui bahwa sumbernya adalah perbedaan nilai atau persepsi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Perbedaan nilai atau persepsi yang dimaksud yakni Roem memiliki pendiriannya sendiri dengan argumentasinya yang menganggap bahwa perjanjian tersebut dapat membawa dampak positif untuk Indonesia dan status dia sebagai delegasi sah secara konstitusional. Namun, pihak Natsir-Sjafruddin memiliki pandangan atau persepsi bahwa yang dilakukan oleh Roem tersebut tidak sah karena bukan berasal dari pihak yang berkuasa secara sah yakni Ketua PDRI, di samping itu perjanjian tersebut justru dirasa melemahkan Indonesia, karena

<sup>62</sup>. Faridah, *Peran Mohammad Natsir*, 81.

<sup>63</sup>. Lukman Hakiem, *Jejak Perjuangan Para Tokoh Muslim Mengawal NKRI*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 167.

<sup>64</sup>. A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IX*, (Bandung: Angkasa, 1995), 540.

pada saat itu Indonesia sedang dalam kondisi yang menguntungkan untuk memukul mundur Belanda.

### 3. Metode Penyelesaian Konflik Kasus Perjanjian Roem Royen

Pada tanggal 28 Mei 1949, Masyumi mengadakan rapat yang mempertemukan dua kelompok pro-kontra atas perundingan Roem-Royen. Pihak pro dipimpin Roem dan kontra dipimpin Natsir. Di dalamnya, kedua pihak menyatakan pendapatnya masing-masing terkait hasil perjanjian Roem-Royen. Hasil dari rapat ini, Masyumi memberikan persetujuan terhadap perjanjian Roem-Royen.<sup>65</sup> Pada akhirnya, tanggal 14 Juni 1949 Sjafrudin Prawiranegara bersedia menerima Pernyataan Roem-Royen dengan syarat: (a) Angkatan bersenjata republik harus berada dalam posisi yang saat itu didudukinya; (b) Angkatan bersenjata Belanda berangsur ditarik dari posisi yang saat itu didudukinya; (c) Pengembalian pemerintah republik ke Yogyakarta dilakukan tanpa syarat; (d) Kedaulatan republik atas Jawa, Madura, dan Sumatera dan pulau-pulau sekitar harus diakui oleh Belanda dengan persetujuan Linggarjati.<sup>66</sup> Setelahnya, pada tanggal 18 Juni, Sultan Jogja atas perintah PDRI memberikan perintah gencatan senjata untuk pasukan Indonesia yang ada di Jogja. Sebagai persiapan penarikan pasukan Belanda di daerah tersebut.<sup>67</sup>

Meski secara pribadi Natsir menentang isi persetujuan Roem-Royen, namun Natsir tetap berupaya membela persetujuan itu saat berpidato di depan penduduk setempat dalam rapat umum tanggal 7 Juli 1949.

Sekaligus mengungkapkan, “*jangan kita berkecil hati melihat kaart*” ia menegaskan bahwa kompromi itu hanyalah sebuah tahapan, yang meskipun tidak memuaskan namun diperlukan, dalam rangka menuju Indonesia bersatu dan berkedaulatan.

Menanggapi pidato Natsir itu, Sjafruddin menyampaikan ungkapan kekecewaan rakyat, meski akhirnya bersedia, demi persatuan, untuk tunduk pada kesepakatan yang telah disetujui, Sjafruddin mengatakan yang pada intinya adalah “jangan sampai ketidakpuasan kita terhadap hasil perjanjian membuat bangsa menjadi terpecah belah”. Sehingga, yang ditekankan adalah persatuan dan kesatuan dari pada perpecahan.<sup>68</sup>

Sjafruddin juga sempat mengkritik Roem dengan mengomentari langkahnya yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur seharusnya, namun dalam kritik tersebut juga ditunjukkan pernyataan Sjafruddin secara tegas walaupun berbeda pendirian, namun persatuan lebih penting.<sup>69</sup> Meskipun sebagian pimpinan partai menentang perundingan itu, fakta bahwa perjuangan diplomatik itu dipimpin oleh salah satu anggota mereka, membuat Masyumi yakin bahwa hasil tersebut adalah perolehan terbaik dari kemungkinan terburuk. Sehingga, akhirnya diterima oleh partai melalui perdebatan yang sengit.<sup>70</sup>

Dalam kasus ini, pimpinan Masyumi menggunakan metode penyelesaian secara integratif. *Pertama*, mereka melakukan konfrontasi yang ditandai dengan adanya rapat mendengarkan pendapat masing-

<sup>65</sup> Faridah, *Peran Mohammad Natsir*, 81-82.

<sup>66</sup> Kahin, *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*, 594.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Madinier, *Partai Masjumi*, 103.

<sup>69</sup> Lukman Hakiem, *Jejak Perjuangan Para Tokoh Muslim Mengawal NKRI*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 168.

<sup>70</sup> Ibid., 104.



masing pihak yang pro dan kontra. Kemudian, muncul konsensus yang menghasilkan penerimaan (akomodasi) dari pihak kontra yang dipimpin Natsir atas apa yang sudah dilakukan oleh kelompok Roem. Mereka pada akhirnya menerima hasil dari perjanjian Roem-Royen. *Kedua*, adanya konsensus dengan mengambil kompromi yang dapat dilihat ketika Sjafruddin menuntut empat poin syarat yang harus dipenuhi pasca ditandatangani perjanjian Roem-Royen. Dan tuntutan itu pun dipenuhi, yakni ketika Sultan Jogja memerintahkan gencatan senjata agar pasukan Belanda berangsur-angsur dapat menarik pasukan. Sehingga, dalam kasus ini Sjafruddin mengambil kompromi, yakni menerima hasil perundingan tapi dengan syarat yang harus dipenuhi atas konsekuensi dari perjanjian Roem-Royen. Selain itu, Sjafruddin juga memaklumi keputusan Roem yang menyatakan bahwa dia hanya menjalankan kewajibannya saja sebagai seorang delegasi. *Ketiga*, penggunaan tujuan superordinat. Yakni, ketika Natsir mengatakan persetujuan ini adalah tahapan menuju Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Sjafruddin pun mengatakan kurang lebih demikian, bahwasannya walaupun perjanjian tersebut tidak memuaskan, namun tetaplah jaga persatuan dan kesatuan ke dalam dan keluar. Persatuan adalah tujuan yang lebih penting dan genting dilakukan dari pada perdebatan pro dan kontra atas perjanjian Roem-Royen.

Dari sini, bisa diambil pelajaran bahwasanya penyelesaian dengan cara kompromi bisa dilakukan ketika konsensus bisa dicapai secara bulat dengan syarat satu pihak dalam organisasi memiliki tuntutan tertentu yang perlu dipenuhi, tuntutan itu juga diperlukan dalam organisasi ataupun eksternal

organisasi. Seperti kasus perjanjian Roem-Royen ini, demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Sjafruddin mengajukan syarat agar dia mau menerima perjanjian Roem-Royen itu. Syarat itu berdampak pada kepentingan bangsa secara luas. Di atas itu semua, Sjafruddin menerima persetujuan itu demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Artinya, dia melakukan itu atas dasar kepentingan bersama yang lebih penting dari tuntutan dan perbedaan yang tidak membuat dia tidak sepakat dengan perjanjian Roem-Royen. Syaratnya memang untuk mengusulkan syarat atau tuntutan diperlukan kewenangan dan kapasitas untuk mengusulkan tuntutan sebagaimana Sjafruddin sebagai seorang Ketua PDRI.

Kemudian, untuk mengambil keputusan akomodasi bisa dilakukan ketika perselisihan bisa ditemukan titik terang secara bulat dengan syarat satu pihak mengalah atas tuntutan atau kemauan satu pihak lainnya. Akomodasi baik dilakukan apabila satu pihak dalam organisasi yang mengalah, ketika menerima tuntutan pihak lain tidak mengorbankan banyak kepentingannya, atau bahkan tidak mengorbankan apapun. Mungkin bisa saja ada konflik karena perbedaan nilai, persepsi, atau kepentingan atas kebijakan tertentu, ketika dilakukan rapat atau musyawarah ternyata persepsi yang awalnya bertentangan bisa diluruskan dan pihak yang kontra awalnya menentang menjadi menerima karena persepsinya sudah diluruskan.

#### **4. Hasil Konflik Kasus Perjanjian Roem Royen**

Untuk penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Natsir sesuai rapat, hasil konflik tersebut adalah Natsir mengalah untuk kepentingan kesatuan dan persatuan,

karena pihak Natsir kala itu menerima (mengakomodasi) perjanjian Roem-Royen. Sedangkan data terkait Sjafruddin yang memberikan syarat dalam rangka menanggapi persetujuan tersebut, pada awalnya Sjafruddin tidak menerima perjanjian tersebut lalu akhirnya menerima dengan syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sjafruddin sebagai PDRI ketika itu menyelamatkan eksistensi Republik, Roem memimpin perjuangan diplomatik, sedangkan Natsir mengakurkan keduanya.

Setelah itu, hasil dari perjanjian Roem-Royen pun dijalankan seperti poin-poin yang sudah disepakati. Tidak lama setelah itu pasukan Belanda yang ada di Yogyakarta menarik diri, Yogyakarta kembali menjadi pusat pemerintahan dan Sjafruddin mengembalikan mandatnya sebagai ketua PDRI kepada Soekarno. Dilaksanakannya perjanjian ini membuat situasi politik nasional yang saat itu sedang tegang karena agresi militer Belanda, menjadi lebih tenang hingga pada puncaknya Indonesia dan Belanda mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dalam pertemuan itu Belanda mengakui secara resmi kedaulatan Indonesia.

## **Kesimpulan**

Dalam kasus perjanjian Roem-Royen terdapat konflik dalam internal Masyumi. Ada pihak yang pro dan kontra terhadap perjanjian tersebut. Pihak yang pro dipimpin oleh Roem dan pihak yang kontra dipimpin oleh Natsir dan Sjafruddin. Konflik ini, bersumber dari perbedaan nilai atau persepsi antara satu sama lain terkait

prosedur dan dampak dari hasil persetujuan. Konflik ini, berjenis konflik antar kelompok yang diwakilkan oleh masing-masing tokohnya. Pada akhirnya, konflik ini dapat terselesaikan dengan menggunakan penyelesaian masalah integratif yang damai melalui metode akomodasi khususnya Natsir dkk. dan kompromi oleh Sjafruddin, serta penggunaan tujuan superordinat. Hasil dari konflik ini adalah tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kedua pihak mendapatkan apa yang mereka harapkan walaupun tidak semuanya terpenuhi, dan tidak kehilangan seluruhnya yang mereka miliki.

Sebagai rekomendasi dari hasil studi ini bagi pengembangan organisasi dakwah, adalah bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cara-cara yang relevan dengan apa yang dipermasalahkan serta kondisi masing-masing pihak yang berkonflik. Konflik dalam organisasi tidak boleh dianggap enteng lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian atau pengelolaan. Organisasi perlu memiliki prosedur yang disepakati bersama dalam mengatasi konflik yang ada. Seperti rapat atau musyawarah yang umum dilakukan dalam organisasi. Agar apabila ada yang berkonflik, mereka memiliki kesadaran untuk melakukan prosedur penyelesaian yang sudah disepakati. Sehingga, konflik yang ada lebih terkendali dan tidak berlarut-larut. Ketika mengatasi konflik sebaiknya pimpinan dan anggota organisasi senantiasa menganalisa kesesuaian metode penyelesaian masalahnya dengan asumsi persoalan konflik yang sedang terjadi.

## Bibliografi

- Argenti. "Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 5, No. 1, (2020) : 48. doi: <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3731>
- Ari, Novianto. "Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera)." *Jurnal Mozaik*, Vol. 08, No.1, (2016) : 81. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10769>
- Bachri, Bachtiar. "Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, (2010).
- Budiman, Agus. "Sejarah Diplomasi Roem-Royen Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949." *Jurnal Unigal*. Vol. 4, No. 1, (2017) : 86-112. doi: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp/article/view/388>
- Daru, Septi. "Mohammad Roem: Seorang Pejuang Indonesia (1946-1949)." Skripsi—Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2007.
- Faridah. "Peranan Mohammad Natsir dalam Partai Politik Islam Masyumi." Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1992.
- Hafidh, Alfi. "Dinamika Partai Masyumi pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)." *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 2, (2015) : 40. doi: <http://doi.org/10.25273/ajsp.v5i02.885>
- Hakim, Lukman. *Jejak Perjuangan Para Tokoh Muslim Mengawal NKRI*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Harahap, Nusapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 1, (2014): 1. doi: <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>
- Hidayat, Achmad & Gumilar, Setia. "Friction in Masyumi: A Historical Studies on Internal Conflict Event of Islamic Party in Indonesia, 1945-1960." *International Journal for Historical Studies*, Vol.8, No.1, (2016): 59-68. doi: <https://doi.org/10.2121/tawarikh.v8i1.719>
- Ihza, Yusril, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan)*. Diterjemahkan oleh Munim A. Sirry. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Indra, Yusri dkk. "Peran Sjafruddin Prawiranegara dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI dari Agresi Militer Belanda II di Riau, Tahun 1948-1949." *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 4, No.1, (2017) : 10. doi: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/view/12661>
- Khalik, Subehan. "Hubungan-Hubungan Internasional di Masa Damai." *Al-Daulah*, Vol. 3, No.2, (2014): 237. doi: [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1508](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1508)
- Kharismulloh, Moch.H. "Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948-1948 dalam Perspektif Fiqh Siyasa dan Hukum Tata Negara." *Al-Mazahib*, Vol.3, No.1, (2015): 161-187. doi: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1387>
- Kahin, McTurnan. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Di terjemahkan oleh Tim Komunitas Bambu. New York: Cornell University Press, 1952.
- Lumintang, Juliana. "Dinamika Konflik dalam Organisasi." *E-Journal Acta Diurna*, Vol. IV, No. 2, (2015): 7 - 8. doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/7255/6758>

- Madinier, Remy. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*. Diterjemahkan oleh Tonny Pasuhuk. Jakarta: Mizan, 2011.
- Mukminin, Moh Amirul. "Hubungan NU dan Masyumi (1945-1960) Konflik dan Keluarnya NU dari Masyumi." *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 3, No. 3, (2015): 487. doi: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12808/11801>
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15, No. 1, (2011): 134. doi: <http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Musholi. "Pengembangan Masyarakat dan Manajemen Dakwah." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol.9, No.2, (2017): 490. doi: <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/58>
- Muspawi, Mohamad. "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 16, No. 2, (2014)
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Pers, 1987.
- Rahman, Abdul. "Masyumi dalam Konstelasi Politik Orde Lama." *Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Makassar*, 2017: 160. doi: <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/3998>
- Rizkianto, Anggit. "Kepemimpinan Karismatik H.O.S. Tjokroaminoto di Sarekat Islam." *Jurnal Inteleksia*, Vol. 2, No. 1, (2020): 67. doi: <http://www.inteleksia.stidalhadid.ac.id/index.php/inteleksia/article/download/71/32>
- Siregar, Insan Fahmi. "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)." *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 14, No.1, (2013): 101. doi: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/614>
- Supri, dkk. "Konflik Internal Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)*, Vol. 1, No.2, (2019): 1-9. doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/54533>
- Syahrudin. "Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo." *Jurnal Lentera*, Vol. IV, No. 1, (2020): 67. doi: <https://doi.org/10.21093/lentera.v2i2.1235>
- Tasnur dan Rijal. "Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)." *Jurnal Candrasangkala*, Vol. 5, No.2, (2019): 64. doi: <http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v5i2.6599>
- Wahyudi, Andri. "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan." *Jurnal Unita*, Vol. 8, No. 1, (2015): 3-4. doi: <http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/45>
- Wahyudi. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Waluyo. *Dari "Pemberontak" Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*. diedit oleh M. Nursam (Yogyakarta: Ombak, 2009).
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Yusa, I Gede. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.